



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 102 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDARISASI PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan naskah dinas yang tertib secara administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan standarisasi penomoran naskah dinas pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI
PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Lembaga selain PD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan kegiatan berada di bawah pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah.
10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
11. Penomoran Naskah Dinas adalah informasi tertulis penomoran PD sebagai alat komunikasi nomor PD yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan naskah dinas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi PD dalam penyelenggaraan persuratan dan pengelolaan Naskah Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kearsipan dalam pengelolaan Naskah Dinas pada PD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penomoran Naskah Dinas;
- b. pencantuman nomor; dan
- c. pengelolaan nomor. *au*

BAB II
PENOMORAN NASKAH DINAS


Pasal 5

- (1) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. nomor kode klasifikasi;
 - b. nomor urut surat;
 - c. nomor kode PD;
 - d. nomor kode perjanjian; dan
 - e. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicantumkan sesuai permasalahan dan substansi Naskah Dinas dengan berpedoman pada Kode Klasifikasi Kearsipan.
- (3) Kode Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nomor urut surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan sesuai dengan urutan kronologis dalam buku surat keluar PD.
- (5) Nomor kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicantumkan sesuai dengan kode PD/UPTD/Cabang Dinas pengolah Naskah Dinas.
- (6) Kode PD/UPTD/Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dicantumkan pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian.
- (8) Tahun pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dicantumkan sesuai dengan tahun pembuatan pada Naskah Dinas yang berbentuk perjanjian.

BAB III
PENCANTUMAN NOMOR

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pencantuman nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas.
- (2) Tata cara pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan dengan dipisahkan tanda garis miring (/) dan letaknya disesuaikan dengan format Naskah Dinas.
- (3) Teknik pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 7

Penomoran terhadap Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur dicantumkan secara berurutan yang terdiri atas:

- a. nomor kode klasifikasi;
- b. nomor urut surat; dan
- c. nomor kode PD.

Pasal 8

- (1) Penomoran terhadap Naskah Dinas dengan bentuk dan susunan perjanjian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur, penomoran dicantumkan secara berurutan terdiri atas:
 1. kode klasifikasi;
 2. nomor urut;
 3. nomor kode perjanjian; dan
 4. tahun pembuatan.
 - b. perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan PD atas nama Gubernur dalam kedudukan dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, penomoran dicantumkan secara berurutan terdiri atas:
 1. nomor kode klasifikasi;
 2. nomor urut surat ;
 3. nomor kode PD; dan
 4. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGELOLAAN NOMOR


Pasal 9

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur menjadi tugas, tanggungjawab dan fungsi ketatausahaan pada PD dengan memperhatikan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 10

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan PD atas nama Gubernur menjadi tugas dan tanggungjawab dari unit pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang ekonomi dan kerjasama.

Pasal 11

- (1) Penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD ditetapkan oleh masing-masing UPTD/Cabang Dinas dan lembaga bersangkutan. 

- (2) Nomor kode PD yang tercantum dalam penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PD induk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 102

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 102 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 November 2019

KODE KLASIFIKASI

KODE	URUSAN	
000	UMUM	
001	Lambang Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Lambang :	
	.1	Garuda
	.2	Bendera Kebangsaan
	.3	Lagu Kebangsaan
	.4	Lambang Daerah
	1	Provinsi
	2	Kabupaten/ Kota
002	Tanda kehormatan/Penghargaan (Untuk tanda kehormatan/penghargaan Pegawai lihat 861) Arsip atau naskah yang berhubungan dengan penghargaan :	
	.1	Bintang
	.2	Satyalencana
	.3	Samkarya Nugraha Monumen
	.4	Samkarya Nugraha
	.5	Penghargaan secara adat
	.6	Penghargaan lainnya.
003	Peringatan Hari Besar Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Hari Besar Nasional 17 Agustus Hari Pahlawan dan sebagainya.
	.2	Hari Raya/Besar Keagamaan
	.3	HUT
	.4	Hari Besar Internasional
004	Ucapan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	ucapan terima kasih
	.2	ucapan selamat
	.3	ucapan belasungkawa
	.4	ucapan lainnya.
005	Undangan	
006	Tanda Jabatan	
	.1	Pamong Praja

	.2	Tanda Pengenal
	.3	Pejabat lainnya
007	-	
008	-	
009	-	
010	URUSAN DALAM Gedung Kantor/Termasuk instalasi Prasarana Fisik Pamong	
011	Kantor Dinas Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Kantor Dinas	
012	Rumah Dinas Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Tanah untuk rumah dinas
	.2	Perabot Rumah Dinas.
	.3	Rumah Dinas Gol. I
	.4	Rumah Dinas Gol. II
	.5	Rumah Dinas Gol. III
	.6	Rumah/ Bangunan lainnya
	.7	Rumah Pejabat Negara
013	Mess/guest house	
014	Rumah Susun/ Apartemen	
015	Penerangan listrik/ Jasa Listrik	
016	Telepon/ Faximile/ Internet	
017	Keamanan/ketertiban kantor	
018	Kebersihan kantor	
019	Protokol Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Upacara bendera
	.2	Tata tempat
	1	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
	.3	Audensi/ Menghadap Pimpinan
	.4	Alamat-alamat kantor pejabat
	.5	Bandir/ Umbul-umbul/ Spanduk
020	PERALATAN	
	.1	Penawaran
021	Alat tulis	
022	Mesin kantor	
023	Perabot kantor	
024	Alat angkutan	
025	Pakaian dinas	
026	Senjata	
027	Pengadaan	
028	Inventaris	
029	-	

030	KEKAYAAN DAERAH	
031	Sumber Daya Alam	
032	Asset Daerah	
033	-	
034	-	
035	-	
036	-	
037	-	
038	-	
039	-	
040	PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI	
041	Perpustakaan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Perpustakaan Umum
	.2	Khusus
	.3	Perguruan Tinggi
	.4	Sekolah
	.5	Keliling
	.6	Sumbangan Buku
042	Dokumentasi	
043	-	
044	-	
045	Kearsipan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan kearsipan meliputi :	
	.1	Pola Klasifikasi
	.2	Penataan Berkas
	.3	Penyusutan Arsip
	1	Jadwal Retensi Arsip
	2	Pemindahan Arsip
	3	Penilaian Arsip
	4	Pemusnahan Arsip
	5	Penyerahan Arsip
	6	Berita Acara Penyusutan Arsip
	7	Daftar Pencarian Arsip
	.4	Pembinaan Kearsipan
	1	Bimbingan Teknis
	.5	Pemeliharaan/ Perawatan Arsip
	.6	Pengawetan/Fumigasi
046	Sandi	
047	Website	
048	Pengelolaan Data	
049	Jaringan Komunikasi Data	

050	PERENCANAAN		
	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan perencanaan meliputi :		
	.1	Repelita / 8 sukses	
		1	Renstra Daerah RPJP RPJM RPJMD Musrenbang
		2	Bantuan Pembangunan Daerah
		3	BAPPEDA
	.2	laporan fisik dan keuangan kegiatan.	
051	Bidang Pemerintahan Digunakan untuk urusan/ masalah pemerintahan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pemerintah yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 100.		
052	Bidang Politik Digunakan untuk urusan/ masalah politik yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang politik yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 200		
053	Bidang Keamanan dan Ketertiban Digunakan untuk urusan/ masalah keamanan dan ketertiban yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang keamanan dan ketertiban yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 300.		
054	Bidang Kesejahteraan Digunakan untuk urusan/ masalah kesejahteraan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang kesejahteraan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 400		
055	Bidang Perekonomian Digunakan untuk urusan/ masalah perekonomian yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang perekonomian yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 500		
056	Bidang Pekerjaan Umum Digunakan untuk urusan/ masalah pekerjaan umum yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pekerjaan umum yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 600		
057	Bidang Pengawasan Digunakan untuk urusan/ masalah pengawasan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pengawasan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 700		
058	Bidang Kepegawaian Digunakan untuk urusan/ masalah kepegawaian yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang kepegawaian yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 800		
059	Bidang Keuangan Digunakan untuk urusan/ masalah keuangan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang keuangan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 900		
060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN		
	.1	Program Kerja	
061	Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)		
	.1	Susunan tata kerja	
	.2	tata tertib kantor jam kerja dan lain-lain	
062	Organisasi Badan Non Pemerintah		
063	Organisasi Badan Internasional		

064	Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI	
065	Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem	
066	Stempel Dinas	
067	Pelayan Umum/ Pelayanan Publik/ Analisis	
068	Komputerisasi	
069	Standar Pelayanan Minimal	
070	PENELITIAN	
071	Riset Ijin Riset, Hasil Riset, dsb.	
072	Survey Ijin Survey, Hasil Survey dsb.	
073	Kajian	
074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	
080	KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR	
081	Gubernur	
082	Bupati/Walikota	
083	Komponen Eselon lainnya	
084	Instansi lainnya	
087	-	
088	-	
089	-	
090	Perjalanan Dinas Klasifikasikan disini perjalanan dinas pegawai pemerintah daerah/kabupaten.	
093	Perjalanan Dinas Pegawai Eselon I	
094	Perjalanan pegawai termasuk pemanggilan pegawai	
098	Perjalanan pejabat ke luar negeri	
099	Perjalanan pegawai ke luar negeri	
100	PEMERINTAHAN	
	.1	Tata Praja
	.2	Legislatif
	.3	Yudikatif
	.4	Hubungan Luar Negeri
120	PEMERINTAH PROVINSI Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi meliputi :	
	.04	Laporan daerah
	2	Monografi tambahkan kode wilayah
	.1	Koordinasi
	.2	Instansi Tingkat Provinsi
	1	Dinas Otonomi
	2	Dinas Vertikal
	3	Kerjasama antar Provinsi/ Kabupaten

121	Gubernur Nusa Tenggara Timur (kode wilayah 53). Tambahkan dibelakang kode klasifikasi.		
	.1	Pencalonan	
	.2	Pengangkatan	
	.3	Meninggal	
	.4	Pelantikan	
	.5	Pemberhentian	
	.6	Serah Terima Jabatan	
122	Wakil Gubernur meliputi :		
	.1	Pencalonan	
	.2	Pengangkatan	
	.3	Meninggal	
	.4	Pelantikan	
	.5	Pemberhentian	
	.6	Serah terima jabatan	
123	Sekretaris Daerah Provinsi meliputi :		
	.1	Pencalonan	
	.2	Pengangkatan	
	.3	Meninggal	
	.4	Pelantikan	
	.5	Pemberhentian	
	.6	Serah terima jabatan	
124	Badan – badan Pertimbangan Daerah meliputi Forkominda		
125	Pembentukan/pemekaran wilayah Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :		
	.1	Pembentukan/pemekaran wilayah meliputi Pembinaan/Perubahan Nama kepada :	
		1	Daerah
		2	Kota
		3	Benda Geografis
		4	Gunung
		5	Sungai
		6	Pulau
		7	Selat
		8	Batas Laut.
	.2	Pembentukan Wilayah	
	.3	Pemindahan Ibukota	
	.4	Perubahan Batas Wilayah	
	.5	Pemekaran Wilayah	
	.6	Forum Koordinasi Lainnya	
126	Pembagian wilayah		
127	Penyerahan urusan		
128	Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah		
129	-		
130	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA		
131	Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi:		
	.1	Pencalonan	
	.2	Pengangkatan	

	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
132	Sambutan/ Pengarahan/ Amanat Wakil Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, meliputi :	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
133	Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Tambahkan Kode Wilayah, meliputi :	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	
	.1	Muspida
	.2	Forum Panitia Anggaran Nasional
	.3	Forum Koordinasi Lainnya
	.4	Kerjasama antar Kabupaten/ Kota
135	Pembentukan/ Pemekaran Wilayah	
	.1	Pemindahan Ibukota
	.2	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
	.3	Pemabagian Wilayah Kabupaten/Kota
	.4	Perubahan Batas Wilayah
	.5	Pemekaran Wilayah
	.6	Permasalahan Batas Wilayah
	.7	Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
	.8	Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, Jalan
136	Pembagian Wilayah	
137	Penyerahan Urusan	
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	
	.1	Sambutan / Pengarahan / Amanat
	.2	Pembentukan Kecamatan
	.3	Pemekaran Kecamatan
	.4	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
	.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
	.6	-
	.7	-
139		
140	PEMERINTAH DESA / KELURAHAN	
141	Pamong Desa meliputi :	
	.1	Pencalonan

	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
142	Penghasilan Pamong Desa	
143	Kekayaan Desa	
144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa	
145	Administrasi Desa	
146	Kewilayahan	
	.1	Pembentukan Desa/Kelurahan
	.2	Pemekaran Desa/Kelurahan
	.3	Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
	.4	Perubahan Nama Desa / Kelurahan
	.5	Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
147	Lembaga- lembaga Tingkat Desa	
160	DPRD PROVINSI	
161	Keanggotaan DPRD Provinsi meliputi :	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Pemberhentian
	.4	Recall
	.5	Meninggal
	.6	Pelanggaran
162	Persidangan	
	.1	Reses
163	Kesejahteraan	
	.1	Keuangan
	.2	Penghargaan
164	Hak	
165	Sekretaris DPRD Provinsi	
180	HUKUM	
	.1	Konstitusi
	1	Dasar Hukum
	2	Undang- Undang Dasar
	.2	GBHN
	.3	Amnesty, Abolisi, Grasi
181	Perdata	
	.1	Tanah
	.2	Rumah
	.3	Utang/ Piutang
	1	Hipotik
	2	Gadai
	.4	Notariat
182	Pidana	
	.1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

183	Peradilan
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
	.1 Visa
	.2 Passport
	.3 Exit
	.4 Reentry
	.5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang- Undangan .
	.1 TAP MPR
	.2 Undang- undang Dasar
	.3 Peraturan
	1 Peraturan Pemerintah
	2 Peraturan Menteri
	3 Peraturan Lembaga Non Kementerian
	4 Peraturan Daerah
	1 Peraturan Provinsi
	2 Peraturan Kabupaten/ Kota
	.4 Keputusan
	1 Presiden
	2 Menteri
	3 Lembaga Non Departemen
	4 Gubernur
	5 Bupati/ Walikota
	.5 Instruksi
	1 Presiden
	2 Menteri
	3 Lembaga Non Departemen
	4 Gubernur
	5 Bupati/ Walikota
189	Hukum Adat
	1 Tokoh Adat/ Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Dengan Negara Asing
	1 Asean
	2 Bantuan Luar Negeri/ Hibah
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/ LOAN
198	-
199	-

200	POLITIK	
210	KEPARTAIAN	
211	Lambang Kepartaian	
212	Kartu Tanda Anggota	
213	Bantuan Keuangan Parpol	
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
221	Berdasarkan perjuangan	
	.1	Perintis Kemerdekaan
	.2	Angkatan 45
	.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan	
	.1	PEPABRI
	.2	Wredatama
223	Berdasarkan Kerohanian	
224	Lembaga Adat	
225	Lembaga Swadaya Masyarakat	
226	-	
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL	
232	Persatuan Guru Republik Indonesia	
231	Ikatan Dokter Indonesia	
232	Persatuan Guru Republik Indonesia	
233	PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA	
234	Persatuan Advokat Indonesia	
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	
236	Korps Pegawai Republik Indonesia	
237	Persatuan Wartawan Indonesia	
238	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia	
239	Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya	
240	ORGANISASI PEMUDA	
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	
242	Organisasi Mahasiswa	
243	Organisasi Pelajar	
244	Gerakan Pemuda Anshor	
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia	
246	Gerakan Pemuda Marhaenis	
247	-	
248	-	
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN	
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia	
252	Organisasi Buruh Internasional	
253	Himpunan Kerukunan Tani	
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia	
256	-	
257	-	
258	-	

259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Persatuan Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Perempuan (wanita)
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
265	-
268	-
269	-
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
	.1 TPS
	.2 Kendaraan
	.3 Surat Suara
	.4 Kotak Suara
	.5 Dana
277	Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
280	-
281	-
282	-
283	-
284	-
300	KEAMANAN/ KETERTIBAN
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Perbatasan
315	-
316	-
317	-

320	KEMILITERAN	
321	Latihan Militer	
322	Wajib Militer	
323	Operasi Militer	
324	Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI	
	.1	TMD
325	-	
326	-	
327	-	
328	-	
330	KEAMANAN	
331	Kepolisian	
	.1	Polisi Pamong Praja
	.2	Karma
	.3	Kamling
	.4	Jaga Wana
332	Huru-Hara/ Demonstrasi	
333	Senjata Api Tajam	
334	Bahan Peledak	
335	Perjudian	
336	Surat- surat Kaleng	
337	Pengaduan	
338	Himbauan/ Larangan	
339	Teroris	
340	PERTAHANAN SIPIL	
341	Perlindungan Sipil	
350	KEJAHATAN	
351	Makar/ Pemberontakan	
352	Pembunuhan	
353	Penganiayaan Pencurian	
354	Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika	
355	Pemalsuan	
356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan/ KKN	
357	Pemeriksaan/ Perbuatan Cabul	
358	Kenakalan	
359	Kejahatan lainnya	
360	BENCANA	
361	Gunung Berapi/ Gempa	
362	Banjir/ Tanah Longsor	
363	Angin Topan	
364	Kebakaran	
	.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan	
366	Tsunami	
370	KECELAKAAN/ SAR	
371	Darat	
372	Udara	

373	Laut		
374	Sungai/ Danau		
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
401	Keluarga Miskin		
402	PNPM Mandiri Pedesaan		
403	-		
404	-		
410	PEMBANGUNAN DESA		
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong		
	.1	Swadaya Gotong Royong	
		1	Penataan Gotong Royong
		2	Gotong Royong Dinamis
		3	Gotong Royong Statis
		4	Pungutan
	.2	Lembaga Sosial Desa	
		1	Pembinaan
		2	Klasifikasi
		3	Proyek
		4	Musyawarah
	.3	Latihan Kerja Masyarakat	
		1	Kader Masyarakat
		2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		3	Pusat Latihan
		4	Kursus-kursus
		5	Kurikulum/ Syllabus
		6	Keterampilan
		7	Pramuka
	.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
		1	Program
		2	Pembinaan Organisasi
		3	Kegiatan
	.5	Penyuluhan	
		1	Publikasi
		2	Peragaan
		3	Sosio Drama
		4	Siaran Pedesaan
		5	Penyuluhan Lapangan
		6	Keterampilan
	.6	Kelembagaan Desa	
		1	Kelompok Tani
		2	Rukun Tani
		3	Subak
		4	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa		
	.1	Produksi Desa	
		1	Pengolahan

		2	Pemasaran
	.2		Keuangan Desa
		1	Perkreditan Desa
		2	Inventarisasi Data
		3	Perkembangan/ Pelaksanaan
		4	Bantuan/ Stimulan
		5	Petunjuk/ pembinaan Pelaksanaan
		6	Keterampilan
	.3		Koperasi Desa
		1	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
		2	Koperasi Usaha Desa
	.4		Penataan Bantuan Pembangunan Desa
		1	Jumlah Desa yang diberi Bantuan
		2	Pengarahan
		3	Pusat
		4	Daerah
	.5		Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
		1	Pusat
		2	Daerah
	.6		Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
		1	Bantuan Langsung
		2	Bantuan Keserasian
		3	Bantuan Juara Lomba Desa
413			Prasarana Desa
	.1		Prasarana Desa
		1	Pembinaan
		2	Bimbingan Teknis
	.2		Pemukiman Kembali Penduduk
		1	Lokasi
		2	Diskusi
		3	Pelaksanaan
	.3		Masyarakat Pradesa
		1	Pembinaan
		2	Penyuluhan
	.4		Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
		1	Rumah Sehat
		2	Proyek Perintis
		3	Pelaksanaan
		4	Pengembangan
		5	Perbaikan Kampung
414			Pengembangan Desa
	.1		Tingkat Perkembangan Desa
		1	Jumlah Desa
		2	Pemekaran Desa
		3	Pembentukan Desa Baru
		4	Evaluasi
		5	Bagan
	.2		Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)

		1	Penyuluhan Program
		2	Lokasi UDKP
		3	Pelaksanaan
		4	Bimbingan/ Pembinaan
		5	Evaluasi
	.3	Tata Desa	
		1	Inventarisasi
		2	Penyusunan Pola Tata Desa
		3	Aplikasi Tata Desa
		4	Pemetaan
		5	Pedoman Pelaksanaan
		6	Evaluasi
	.4	Perlombaan Desa	
		1	Pedoman
		2	Penilaian
		3	Kejuaraan
		4	Piagam
415	Koordinasi		
	.1	Sektor Khusus	
	.2	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	
	.3	Tim Koordinasi Pusat (TKP)	
	.4	Kerjasama	
		1	Luar Negeri (UNICEF)
		2	Perguruan Tinggi
		3	Kementerian/ Lembaga Non Kementerian
416	-		
417	-		
418	-		
420	PENDIDIKAN		
421	Sekolah		
	.1	Pra Sekolah	
	.2	Sekolah Dasar	
	.3	Sekolah Menengah	
	.4	Sekolah Tinggi	
	.5	Sekolah Kejuruan	
	.6	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	
	.7	Kegiatan Pelajar	
		1	Reuni Darmawisata
		2	Pelajar Teladan
		3	Resimen Mahasiswa
	.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	
	.9	Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf	
422	Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran		
	.1	Mapras, Perploncoan	
	.2	Tahun Pelajaran	
	.3	Hari Libur	

	.4	Uang Sekolah/ SPP
	.5	Beasiswa
423	Metode Belajar	
	.1	Kuliah
	.2	Ceramah, symposium
	.3	Diskusi
	.4	Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Study Tour
	.5	Kurikulum
	.6	Karya Tulis
	.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar : Guru	
425	Sarana Pendidikan	
	.1	Gedung
	1	Gedung Sekolah
	2	Kampus
	3	Pusat Kegiatan Mahasiswa
	.2	Buku
	.3	Perlengkapan Sekolah
426	Keolahragaan	
	.1	Cabang Olahraga
	.2	Sarana
	1	Gedung Olahraga
	2	Stadion
	3	Lapangan
	4	Kolam Renang
	.3	Pesta Olahraga
	.4	KONI
427	Organisasi dan Kegiatan Remaja	
428	Kepramukaan	
429	Pendidikan Kedinasan untuk Depdagri, lihat 890	
430	KEBUDAYAAN	
431	Kesenian	
	.1	Cabang Kesenian
	.2	Sarana
	1	Gedung Kesenian
432	Kepurbakalaan	
	.1	Museum
	.2	Peninggalan Kuno
	1	Candi termasuk Pemugaran
	2	Benda
433	Sejarah	
434	Bahasa	
435	Usaha Pertunjukkan, Hiburan, Kesenangan	
436	Kepercayaan	
437	-	
438	-	
439	-	

440	KESEHATAN	
441	Pembinaan Kesehatan	
	.1	Gizi
	.2	Mata
	.3	Jiwa
	.4	Kanker
	.5	UKS
	.6	Perawatan
	.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	.8	Pekan Imunisasi Nasional
442	Obat- obatan	
	.1	Pengadaan
	.2	Penyimpanan
443	Penyakit Menular	
	.1	Pencegahan
	.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
	1	Kusta
	2	Kelamin
	3	Frambosia
	4	TBC/ AIDS/ HIV
	.3	Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
	1	Kholera
	2	Imunisasi
	3	Survailense
	4	Rabies (Anjing Gila), Antraks
	.4	Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
	1	Malaria
	2	Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
	3	Filarial
	4	Serangga
	.5	Hygiene Sanitasi
	1	Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
	2	Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
	3	Pestisida
444	Gizi	
	.1	Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan Busung Lapar
	.2	Keracunan Makanan
	.3	Menu Makanan Rakyat
	.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah
	.5	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT- AS)
445	Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Poliklinik.	
446	Tenaga Medis	
448	Pengobatan Tradisional	
	.1	Pijat

	.2	Tusuk Jarum
	.3	Jamu Tradisional
	.4	Dukun/ Paranormal
450	AGAMA	
451	Agama Islam	
	.1	Peribadatan
	1	Sholat
	2	Zakat Fitrah
	3	Puasa
	4	MTQ
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama
	.4	Pendidikan
	1	Tinggi
	2	Menengah
	3	Dasar
	4	Pondok Pesantren
	5	Gedung Sekolah
	6	Tenaga Pengajar
	7	Buku
	8	Dakwah
	9	Organisasi/ Lembaga Pendidikan
	5	Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
	6	Peradilan
	7	Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
	8	Mazhab
452	Agama Protestan	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan Pendeta Domine
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Gerejani
453	Agama Katolik	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan Pendeta Pastor
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Gerejani
454	Agama Hindu	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Keagamaan
455	Agama Budha	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat

	.3	Tokoh Agama Rohaniawan
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Keagamaan
456	Urusan Haji	
	.1	ONH
	.2	Manasik
457	-	
458	-	
459	-	
460	SOSIAL	
461	Rehabilitasi Penderita Cacat	
	.1	Cacat Mata
	.2	Cacat Tubuh
	.3	Cacat Mental
	.4	Bisu/ Tuli
462	Tuna Sosial	
	.1	Gelandangan
	.2	Pengemis
	.3	Tuna Susila
	.4	Anak Nakal
463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	
	.1	Anak Putus Sekolah
	.2	Ibu Teladan
	.3	Anak Asuh
464	Pembinaan Pahlawan	
	.1	Pahlawan , meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
	.2	Perintis Kemerdekaan, meliputi Pembinaan, Penghargaan Dan Tunjangan Kepada Perintis
	.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial	
	.1	Lanjut Usia
	.2	Korban Kekacauan Pengungsi Repatriasi
466	Sumbangan Sosial	
	.1	Korban Bencana
	.2	Pencarian Dana Untuk Sumbangan
	.3	Penyelenggaraan Undian
	.4	Panti Asuhan
	.5	Panti Jompo
467	Bimbingan Sosial	
	.1	Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman
468	PMI	
469	Makam	
	.1	Umum Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan
	.2	Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya

	.3	Khusus Keluarga Raja	
	.4	Krematorium	
470	KEPENDUDUKAN		
471	Pendaftaran Penduduk		
	.1	Identitas Penduduk	
		1	Biodata
		2	Nomor Induk Kepegawaian
		3	Kartu Tanda Penduduk
		4	Kartu Keluarga
		5	Advokasi Indentitas Penduduk
	.2	Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia	
		1	Perpindahan Penduduk WNI
		2	Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
		3	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
		4	Daerah Terbelakang
		5	Bedol Desa
	.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara	
		1	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
		2	Orang Asing Tinggal Sementara
		3	Orang Asing Tinggal Tetap
		4	Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
	.4	Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan	
		1	Akibat Bencana Alam
		2	Akibat Kerusuhan Sosial
		3	Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
		4	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil		
	.1	Kelahiran Kematian Dan Advokasi	
		1	Kelahiran
		2	Kematian
		3	Advokasi Kelahiran Dan Kematian
	.2	Perkawinan Perceraian Advokasi	
		1	Perkawinan Agama Islam
		2	Perkawinan Agama Non Islam
		3	Perceraian Agama Islam
		4	Perceraian Agama Non Islam
		5	Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
	.3	Pengangkatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi	
		1	Pengangkatan Anak
		2	Pengakuan Anak
		3	Pengesahan Anak
		4	Perubahan Anak
		5	Pembatalan Anak
		6	Advokasi Pengurusan Pengangkatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta

	.4	Pencatatan Kewarganegaraan		
		1	Akibat Perkawinan	
		2	Akibat Kelahiran	
		3	Non Perkawinan	
		4	Non Kelahiran	
		5	Perubahan WNI ke WNA	
473	Informasi Kependudukan			
	.1	Teknologi Informasi		
		1	Perangkat Keras	
		2	Perangkat Lunak	
		3	Jaringan Komunikasi dan Data	
	.2	Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi		
		1	Daerah Maju	
		2	Daerah Berrkembang	
		3	Daerah Terbelakang	
	.3	Pengolahan Data Kependudukan		
		1	Pendaftaran Penduduk	
		2	Kejadian Vital Penduduk	
		3	Penduduk Non Registrasi	
	.4	Pelayanan Informasi Kependudukan		
		1	Media Elektronik	
		2	Media Cetak Outlet	
474	Perkembangan Penduduk			
	.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk		
		1	Struktur Jumlah	
		2	Komposisi	
		3	Fertilitas	
		4	Kesehatan Reproduksi	
		5	Morbiditas Penduduk	
		6	Mortalitas Penduduk	
	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk		
		1	Anak dan Remaja	
		2	Penduduk Usia Produktif	
		3	Penduduk Lanjut Usia	
		4	Gender	
	.3	Penataan Persebaran Penduduk		
		1	Migrasi Antar Wilayah	
		2	Migrasi Internasional	
		3	Urbanisasi	
		4	Sementara	
		5	Migrasi Non Permanen	
	.4	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk		
		1	Pengembangan Sistem Pelindungan Kelembagaan Ekonomi	Penduduk Pelayanan
		2	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya	
		3	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya	
		4	Partisipasi Masyarakat	

	.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
	1	Pendidikan Jalur Sekolah
	2	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
	3	Pendidikan Jalur Masyarakat
	4	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475		Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
	.1	Indikator Kependudukan
	1	Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
	2	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
	3	Sosialisasi Indikator Kependudukan
	.2	Proyeksi Kependudukan
	1	Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
	.3	Analisis Dampak Kependudukan
	1	Penyusunan dan Pengembangan
	2	Pemanfaatan Analisi Dampak Kependudukan
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
	1	Lembaga Internasional
	2	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
	3	Lembaga Usaha Swasta
	.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
	1	Lembaga Pemerintah
	2	Pemerintah Provinsi dan Kota
	3	Pemerintah Kabupaten
	.6	Analisis
476		Monitoring
477		Evaluasi
478		Dokumentasi
479		-
480		MEDIA MASSA
489		HUBUNGAN MASYARAKAT
490		PENGADUAN MASYARAKAT
491		-
492		-
500		PEREKONOMIAN
	.1	Dewan Stabilisasi
501		Pengadaan Pangan
502		Pengadaan Sandang
503		Perizinan pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang. Klasifikasikan masalahnya.
504		-
505		-
506		-
507		-

510	PERDAGANGAN		
	.1	Tata niaga	
		1	Promosi perdagangan
		2	Pekan raya
		3	Iklan
		4	Pameran Pameran non komersil
	.2	Pelelangan	
	.3	Tera	
511	Pemasaran		
	.1	Sembilan bahan pokok: Beras, garam, minyak, tanah, minyak goring, sabun, dsb	
	.2	Pasar	
	.3	Pertokoan	
	.4	kaki lima kios	
512	Ekspor		
513	Impor		
514	Perdagangan antar pulau		
515	Perdagangan antar luar negeri		
516	Pergudangan		
517	Aneka usaha perdagangan		
518	Koperasi : untuk BUUD KUD		
519	-		
520	PERTANIAN		
521	Tanaman pangan		
	.1	Program :	
		1	Bimas/Inmas termasuk kredit
		2	Penyuluhan
	.2	Produksi :	
		1	Padi/Panen
		2	Palawija
		3	Jagung
		4	Ketela Pohon/Ubi-ubian
		5	Holtikultura
		6	Sayuran Buah-buahan
		7	Tanaman hias
		8	Pembudidayaan Rumput Laut Perlebahan Panen gagal (puso)
	.3	Sarana usaha pertanian :	
		1	Peralatan meliputi traktor dan sebagainya
		2	Pembibitan
		3	Pupuk
	.4	Perlindungan tanaman :	
		1	Penyakit Penyakit Daun Penyakit Batang Hama Serangga Wereng Walang sangit Tungru Tikus dan sejenisnya
		2	Pemberantasan Hama meliputi : Penyemprotan Penyiangan
		3	Geropyokan Sparayer Pemberantasan Melalui Udara

		4	Pestisida
	.5	Tanah pertanian pangan :	
		1	Persawahan
		2	Perladangan
		3	Kebun
		4	Rumpun Ikan Laut
		5	KTA/Lahan Kritis
	.6	Pengusaha petani	
	.7	Bina Usaha :	
		1	Pasca Panen
		2	Pemasaran Hasil
522	KEHUTANAN		
	.1	Program :	
		1	Hak pengusaha hutan
		2	Tata guna hutan
		3	Perpetaan hutan
		4	Tumpangsari
	.2	Produksi :	
		1	Kayu
		2	Non kayu
	.3	Sarana usaha kehutanan	
	.4	Penghijauan Reboisasi	
	.5	Kelestarian : meliputi :	
		1	Cagar alam marga satwa suaka marga satwa
		2	Berburu meliputi larangan dan ijin berburu
		3	Kebun binatang
		4	Konservasi Lahan
	.6	Penyakit/Hama	
	.7	Jenis-jenis Hutan meliputi :	
		1	Hutan Hidup
		2	Hutan Wisata
		3	Hutan Produksi
		4	Hutan Lindung
523	PERIKANAN		
	.1	Program :	
		1	Penyuluhan
		2	Teknologi
	.2	Produksi :	
		1	Pelelangan
	.3	Usaha perikanan :	
		1	Pembibitan
		2	Daerah penangkapan
		3	Pertambakan meliputi : Tambak Ikan Air Deras Tambak Udang
		4	Jaring Terapung
	.4	Sarana :	
		1	Peralatan

		2	Kapal
		3	Pelabuhan
	.5	Pengusaha	
	.6	Nelayan	
524	PETERNAKAN		
	.1	Produksi :	
		1	Susu ternak rakyat
		2	Telur
		3	Daging
		4	Kulit
	.2	Sarana usaha peternakan :	
		1	Pembibitan
		2	Kandang Ternak
	.3	Kesehatan hewan :	
		1	Penyakit Hewan
		2	Pos Kesehatan Hewan
		3	Tesi Pullorum
		4	Karantina Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk Usaha Pencegahannya
	.4	Perunggsan	
	.5	Pengembangan Ternak :	
		1	Inseminasi Buatan
		2	Pembibitan/Bibit Unggul
		3	Penyebaran Ternak
	.6	Makanan Ternak	
	.7	Tempat Pemotongan Hewan	
	.8	Data Peternakan	
525	PERKEBUNAN		
	.1	Program	
	.2	Produksi :	
		1	Karet
		2	Teh
		3	Tembakau
		4	Tebu
		5	cengkeh
		6	Kelapa/kopra/kelapa sawit
		7	Kopi
		8	Coklat
		9	aneka tanaman
526	-		
527	-		
528	-		
529	-		
530	PERINDUSTRIAN		
	.08	Undang – Undang Gangguan	
531	Industri logam		

532	Industri mesin/elektronik	
533	Industri kimia/farmasi	
534	Industri tekstil	
535	Industri makanan/minuman	
536	Aneka industri/perusahaan	
537	Aneka kerajinan	
538	Usaha Negara / BUMN	
	.1	Perjan
	.2	Perum
	.3	Persero/ PT
	.4	CV
539	Perusahaan daerah/ BUMD/ BULD	
540	PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN	
541	Minyak bumi/bensin meliputi :	
	.1	Pengusahaan
542	Gas bumi	
	.1	Eksplorasi pengeboran meliputi:
	1	Kontrak kerja
	.2	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker
543	Aneka Tambang :	
	.1	Timah
	.2	Aluminium Bouksit
	.3	Besi termasuk besi tua
	.4	Tembaga
	.5	Batu Bara
544	Logam mulia : Intan emas perak	
545	Logam	
546	Geologi	
	.1	Vulkanologi
	1	Pengawasan gunung berapi
	.2	Sumur artesis Air Bawah Tanah
547	Hidrologi	
548	Kesamuderaan	
549	Pesisir Pantai	
550	PERHUBUNGAN	
551	Perhubungan darat meliputi:	
	.1	Lalu lintas jalan raya Sungai Danau
	1	Keamanan lalu lintas rambu-rambu
	.2	Angkutan jalan raya
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Alat angkutan
	.3	Angkutan sungai :
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Pelabuhan

	.4	Angkutan danau
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Pelabuhan
	.5	Feri : Perijinan Terminal Pelabuhan Perkeretaapian
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Pelabuhan
	.6	Perkeretaapian
552		Perhubungan laut
	.1	Lalu Lintas Angkutan Laut Pelayanan Umum
	1	Keamanan Lalu Lintas Rambu-Rambu
	2	Pelayaran Dalam Negeri
	3	Pelayaran Luar Negeri
	.2	Perkapalan Alat Angkutan
	.3	Pelabuhan
	.4	Pengerukkan
	.5	Penjagaan Pantai
553		Perhubungan Udara
	.1	Lalu lintas udara/ Keamanan Lalu Lintas Udara
	.2	Perhubungan udara
	.3	Pelabuhan udara
	.4	Alat angkutan
554		Pos
555		Telekomunikasi meliputi
	.1	Telepon
	.2	Telegram
	.3	Telex/SSB Faximile
	.4	Satelit Internet
	.5	Stasiun bumi Parabola
556		Pariwisata dan rekreasi meliputi
	.1	Obyek kepariwisataan
	.2	Taman Mini Indonesia Indah
	.3	Perhotelan
	.4	Travel service
	.5	Tempat rekreasi
557		Meteorologi meliputi :
	.1	Ramalan Cuaca
	.2	Curah hujan
	.3	Kemarau panjang
558		-
559		-
560		TENAGA KERJA
	.1	Pengangguran
561		Upah

		1	Ganti rugi tanah kelebihan meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan
		2	Ganti rugi tanah absentee Meliputi : Sengketa ganti rugi tanah absentee
		3	Ganti rugi tanah Parti kelir Meliputi : Sengketa ganti rugi tanah partikelir
	.3		Bagi hasil
		1	Penetapan imbangan bagi hasil
		2	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
		3	Sengketa perjanjian bagi hasil
	.4		Gadai tanah
		1	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
		2	Pelaksanaan gadai tanah
		3	Sengketa gadai tanah
	.5		Bimbingan dan penyuluhan
	.6		Pengembangan
	.7		Yayasan Dana Landreform
593			Pengurusan Hak – Hak Tanah
	.01		Penyusunan Program dan Bimbingan teknis
	.1		Sewa tanah
			Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tembakau tebu rosella corchourus
	.2		Hak milik
		1	Perorangan
		2	Badan Hukum
	.3		Hak Pakai
		1	Perorangan
		1	Warga Negara Indonesia
		2	Warga Negara Asing
		2	Badan Hukum
		1	Badan Hukum Indonesia
		2	Badan Hukum Asing. Kedutaan Konsulat Kantor Dagang Asing
		3	Tanah gedung-gedung negara
	.4		Guna usaha
		1	Perkebunan besar
		2	Perkebunan rakyat
		3	Peternakan
		4	Perikanan
		5	Kehutanan
	.5		Hak Guna Bangunan
		1	Perorangan
		2	Badan Hukum
		3	P3MB (Panitia pelaksana penguasaan milik Belanda)
		4	Badan hukum asing – PRK No. 5/65
		5	Pemulihan hak (PenPres 4/1960)
	.6		Hak pengelolaan
		1	PN. Perumnas Bonded ware house Industrial estate Real estate

	2	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
.7		Sengketa Tanah
	1	Peradilan Perkara Tanah
.8		Pencabutan dan pembebasan tanah
	1	Pencabutan hak Pembebasan tanah Ganti rugi tanah
594		Pendaftaran tanah
	.1	Pengukuran/pemetaan
	1	Fotogrametri
	2	Terristis
	3	Triangulasi
	4	Peralatan
	.2	Dana pengukuran
	.3	Sertifikat
	.4	Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
595		Lahan Transmigrasi
	.1	Tata guna tanah
	.2	Landeform
	.3	Pengurusan hak-hak tanah
	.4	Pendaftaran Tanah
596	-	
597	-	
598	-	
599	-	
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
601		Tata bangunan konstruksi industri konstruksi
602		Kontraktor pemborong
	.1	Tender
	.2	Penunjukkan
	.3	Prakualifikasi
	1	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
	2	Tanda Daftar Rekanan
603		Arsitektur
604		Bahan bangunan
	.1	Tanah dan batu seperti : Batu belah steen slag split dsb Pasir koral lempung kapur marmer
	.2	Aspal Aspal buatan aspal alam (butas)
	.3	Besi dan logam lainnya
	1	Besi beton
	2	Besi profil (konstruksi)
	3	Paku
	4	Aluminium profil
	.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat tech oil pengawet kayu)
	.5	Semen
	.6	Kayu seperti : balok papan dolken plywood gabus dsb
	.7	Bahan penutup atap(Genteng asbes gelombang)

	.8	Alat- alat penggantung dan pengunci	
	.9	Bahan - bahan bangunan lainnya	
605	Instalasi		
	.1	Instalasi bangunan	
	.2	Instalasi listrik	
	.3	Instalasi air sanitasi	
	.4	Instalasi pengatur udara	
	.5	Instalasi akustik	
	.6	Instalasi cahaya/penerangan	
606	Konstruksi pencegahan		
	.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran	
	.2	Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa	
	.3	Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin/Udara/Panas	
	.4	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan	
	.5	Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Eksplosif	
	.6	Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga	
	.7	Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom	
607	-		
608	-		
609	-		
610	PENGAIRAN		
611	Irigasi		
	.1	Bangunan Waduk	
		1	Bendungan
		2	Tanggul
		3	Pelimpah banjir
		4	Menara pengambilan
	.2	Bangunan pengambilan	
		1	Bendungan
		2	Bendungan Dengan Pintu Bilas
		3	Bendungan Dengan Pompa
		4	Pengambilan Bebas
		5	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
		6	Sumur Dengan Pompa
		7	Kantung Lumpur
		8	Slit Ekstraktor
		9	Escope chanel
	.3	Bangunan Pembawa	
		1	Saluran
		1	Saluran Induk
		2	Saluran Sekunder
		3	Suplesi
		4	Tersier
		5	Saluran Kwarter
		6	Saluran Pasangan
		7	Saluran Tertutup/Terowongan)
		2	Bangunan

		1	Bangunan Bagi
		2	Bangunan Bagi dan Sadap
		3	Bangunan Sadap
		4	Bangunan Check
		5	Bangunan Terjun
	3		Box Tersier
	4		Got Miring
	5		Talang
	6		Syphon
	7		Gorong-gorong
	8		Pelimpah Samping
	.4		Bangunan Pembuang
		1	Saluran
		1	Saluran Pembuang Induk
		2	Saluran Pembuang Sekunder
		3	Saluran Pembuang Tersier
	2		Bangunan
		1	Bangunan Outlet
		2	Bangunan Terjun
		3	Bangunan Penahan Banjir
	3		Gorong- Gorong Pembuang
	4		Talang Pembuang
	5		Syphon Pembuang
	.5		Bangunan Lainnya
		1	Jalan
		1	Jalan Inspeksi
		2	Jalan Logistik Waduk Lapangan
	2		Jembatan
		1	Jembatan Inspeksi
		2	Jembatan Hewan
	3		Tangga Cuci
	4		Kubangan Kerbau
	5		Waduk Lapangan
	6		Bangunan Penunjang
	7		Jaringan Telepon
	8		Stasiun Agro
612	Folder		
	.1		Tanggul keliling
		1	Tanggul
		2	Bangunan Penutup Sungai
		3	Jembatan
	.2		Bangunan Pembawa
		1	Saluran
		1	Saluran Muka
		2	Saluran Pembawa Induk
		3	Saluran Pembawa Sekunder

			2	Stasiun pengukur air
			3	Stasiun pengukur cuaca
			4	Stasiun pos penjagaan
615	Pengamanan pantai meliputi :			
	.1	Tanggul		
	.2	Krib		
	.3	Bangunan lainnya		
616	Air Tanah			
	.1	Stasiun pompa		
	.2	Bangunan pembawa		
	.3	Bangunan pembuang		
	.4	Bangunan lainnya		
618	-			
619	-			
620	JALAN			
621	Jalan Kota			
	.1	Daerah penguasaan		
		1	Tanah	
		2	Tanaman	
		3	Bangunan	
	.2	Bangunan sementara		
		1	Jalan sementara	
		2	Jembatan sementara	
		3	Kantor proyek	
		4	Gudang proyek	
		5	Barak kerja	
		6	Laboratorium lapangan	
		7	Rumah	
	.3	Badan jalan		
		1	Pekerjaan tanah (Earth Work	
		2	Stabilisasi	
	.4	Perkerasan		
		1	Lapis pondasi bawah	
		2	Lapis pondasi	
		3	Lapis Permukaan	
	.5	Drainage		
		1	Parit tanah	
		2	Gorong-gorong(Culvert)	
	.6	Buku trotoir		
		1	Tanah	
		2	Perkerasan	
		3	Pasangan	
	.7	Median		
		1	Tanah	
		2	Tanaman	
		3	Perkerasan	

		4	Pasangan
	.8		Daerah samping
		1	Tanaman
		2	Pagar
	.9		Bangunan pelengkap dan pengamanan
		1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
		2	Lampu penerangan
		3	Lampu pengatur lalu lintas
		4	Patok-patok KM
		5	Patok-patok ROW (Sempadan)
		6	Rel pengamanan
		7	Pagar
		8	Turap penahan
		9	Bronjong
622			Jalan luar kota
	.1		Daerah penguasaan
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Bangunan
	.2		Bangunan sementara
		1	Jalan sementara
		2	Jembatan sementara
		3	Kantor proyek
		4	Gudang proyek
		5	Barak Kerja
		6	Laboratorium Lapangan
		7	Rumah
	.3		Badan jalan
		1	Pekerjaan tanah (<i>Earth Work</i>)
		2	Stabilisasi
	.4		Perkerasan
		1	Lapis pondasi bawah
		2	Lapis pondasi
		3	Lapis Permukaan
	.5		Drainage
		1	Parit
		2	Gorong-gorong (Culvert)
		3	Subdrainage
	.6		Trotoar
		1	Tanah
		2	Perkerasan
	.7		Median
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Perkerasan
		4	Pasangan

	.8	Daerah samping	
		1	Tanaman
		2	Pagar
	.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan	
		1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
		2	Lampu penerangan
		3	Lampu pengatur lalu lintas
		4	Patok-patok KM
		5	Patok-patok ROW (Sempadan)
		6	Rel pengamanan
		7	Pagar
		8	Turap penahan
		9	Bronjong
623	-		
624	-		
625	-		
630	JEMBATAN		
631	Jembatan Pada Jalan Kota		
	.1	Daerah penguasaan	
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Bangunan
	.2	Bangunan sementara :	
		1	Jalan sementara
		2	Jembatan sementara
		3	Kantor proyek
		4	Gudang proyek
		5	Barak kerja
		6	Laboratorium lapangan
		7	Rumah
	.3	Pekerjaan tanah (<i>Earth Work</i>) :	
		1	Galian tanah
		2	Timbunan tanah
	.4	Pondasi	
		1	Pondasi Kepala Jalan
		2	Pondasi Pilar
		3	Pondasi Angker
	.5	Bangunan Bawah	
		1	Kepala Jembatan
		2	Pilar
		3	Piloon
		4	Landasan
	.6	Bangunan Atas	
		1	Gelagar
		2	Lantai
		3	Perkerasan

		4	Jalan orang/trotoar
		5	Sandaran
		6	Talang air
	.7	Bangunan Pengaman :	
		1	Turap penahan
		2	Bronjong
		3	Kist dam
		4	Korepure
		5	Krib
	.8	Bangunan pelengkap	
		1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
		2	Lampu penerangan
		3	Lampu pengatur lalu lintas
		4	Patok-patok Pengaman
		5	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.9	Oprit	
		1	Badan
		2	Perkerasan
		3	Drainage
		4	Baku
		5	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota		
	.1	Daerah penguasaan	
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Bangunan
	.2	Bangunan sementara	
		1	Jalan sementara
		2	Jembatan sementara
		3	Kantor proyek
		4	Gudang proyek
		5	Barak kerja
		6	Laboratorium lapangan
		7	Rumah
	.3	Pekerjaan tanah (Earth Work) : Galian tanah Timbunan tanah	
		1	Galian tanah
		2	Timbunan tanah
	.4	Pondasi	
		1	Pondasi Kepala Jalan
		2	Pondasi Pilar
		3	Pondasi Angker
	.5	Bangunan bawah	
		1	Kepala Jembatan
		2	Pilar
		3	Piloon
		4	Landasan

	.6	Bangunan atas
	1	Gelagar
	2	Lantai
	3	Perkerasan
	4	Jalan orang/trotoar
	5	Sandaran
	6	Talang air
	.7	Bangunan Pengaman
	1	Turap/ Penahan
	2	Bronjong
	3	Kist Dam
	4	Corepure
	5	Krib
	.8	Bangunan Pelengkap
	1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
	2	Lampu penerangan
	3	Lampu pengatur lalu lintas
	4	Patok-patok Pengaman
	5	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.9	Oprit
	1	Badan
	2	Perkerasan
	3	Drainage
	4	Baku
	5	Median
633	-	
634	-	
635	-	
640	BANGUNAN	
641	Gedung pemerintah	
	.1	Bangunan Pemerintahan
	.2	Gedung Pengadilan
	.3	Rumah Pejabat Negara
	.4	Gedung DPR
	.5	Gedung Balaikota
	.6	Penjara
	.7	Perkantoran
642	Bangunan pendidikan	
	.1	Sekolah Menengah
643	Bangunan rekreasi	
	.1	Bangunan olah raga
	.2	Gedung Kesenian
	.3	Gedung pemancar
644	Bangunan perdagangan	
	.1	Pusat Perbelanjaan
	.2	Gedung Perdagangan

	.3	Bank
	.4	Perkantoran
645	Bangunan pelayanan umum	
	.1	Mandi cuci kakus (MCK) umum
	.2	Gedung Parkir
	.3	Rumah Sakit
	.4	Gedung Telkom
	.5	Terminal Angkutan Udara
	.6	Terminal angkutan air
646	Bangunan peninggalan sejarah	
647	Bangunan industry	
648	Bangunan Tempat Tinggal	
649	Elemen bangunan	
	.1	Pondasi
	1	Di atas tiang
	.2	Dinding
	1	Penahan beban
	2	Tidak menahan beban Atap
	.3	Lantai atau langit-langit
	1	Supended
	2	Solit
	.4	Pintu atau jendela
	1	Pintu harmonic
	2	Pintu biasa
	3	Pintu sorong
	4	Jendela kayu
	5	Jendela sorong
	6	Jendela vertical
650	TATAKOTA	
651	Daerah Perdagangan/Pelabuhan	
	.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
	.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah Pemerintahan	
653	Daerah Perumahan (<i>site & service</i>)	
	.1	Kepadatan Rendah (Low density)
	.2	Kepadatan Tinggi (High density)
654	Daerah Industri	
	.1	Industri Berat
	.2	Industri Ringan
	.3	Industri Rumah (home industry)
655	Daerah rekreasi : Public gardens Sport and playing fields Open space	
656	Transportasi (tata letak) : Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	
657	-	
658	Kesehatan Lingkungan	
659	-	

660	TATA LINGKUNGAN		
	.1	Persampahan	
	.2	Kebersihan Lingkungan	
	.3	Pencemaran	
		1	Pencemaran Air
		2	Pencemaran Udara
661	Daerah hutan		
662	Daerah pertanian/perkebunan		
663	Daerah pemukiman		
664	Pusat pertumbuhan		
665	Transportasi Jaringan jalan jaringan kereta api jaringan sungai		
666	-		
667	-		
668	-		
669	-		
670	KETENAGAAN		
671	Listrik		
672	Tenaga air		
673	Tenaga minyak		
674	Tenaga gas		
675	Tenaga matahari		
676	Tenaga nuklir		
677	Tenaga panas bumi		
678	Tenaga uap		
679	Tenaga lainnya		
680	PERALATAN		
681	-		
682	-		
683	-		
690	AIR MINUM		
691	Intake		
	.1	Broncaptering	
	.2	Sumur	
	.3	Bendungan	
	.4	Saringan (screen)	
	.5	Pintu Air	
	.6	Saluran Pembawa	
	.7	Alat Ukur	
	.8	Perpompaan	
692	Transmisi Air Baku		
	.1	Perpipaan	
	.2	Katup Udara (air Relief)	
	.3	Katup Penguras (Blow Off)	
	.4	Bak Pelepas Tekanan	
	.5	Jembatan Pipa	

	.6	Syphon
693	Instansi Pengelolaan	
	.1	Bangunan Ukur
	.2	Bangunan Aerasi
	.3	Bangunan Pengendapan
	.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
	.5	Bangunan Pengaduk
	.6	Bangunan Saringan
	.7	Perpompaan
	.8	Clear Hell
694	Distribusi	
	.1	Reservoir Menara Bawah Tanah
	1	Menara
	2	reservoir di Bawah Tanah
	.2	Perpipaan
	.3	Perpompaan
	.4	Jembatan Pipa
	.5	Syphon
	.6	Hydran
	1	Hydran Umum
	2	Hydran Kebakaran
	.7	Katup
	1	Katup Udara (Air Relief)
	2	Katup Pelepas (Blow Off)
	.8	Bak Pelepas Tekanan
695	-	
696	-	
697	-	
698	-	
699	-	
700	PENGAWASAN	
701	Bidang urusan dalam	
702	Bidang peralatan	
703	Bidang Kekayaan Daerah	
704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan Sandi	
705	Bidang Perencanaan	
706	Bidang organisasi/ketatalaksanaan	
707	Bidang penelitian	
708	Bidang Konferensi	
709	Bidang Perjalanan Dinas	
710	BIDANG PEMERINTAHAN	
712	Bidang Pemerintahan Provinsi	
716	Bidang DPRD Provinsi	
720	BIDANG POLITIK	
721	Bidang Kepartaian	

722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh Tani dan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Keamanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana
737	Bidang Kecelakaan
738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/ Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/ Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan

769	Bidang Air Minum	
770	-	
771	-	
772	-	
773	-	
774	-	
775	-	
776	-	
777	-	
778	-	
779	-	
780	BIDANG KEPEGAWAIAN	
781	Bidang Pengadaan Pegawai	
782	Bidang Mutasi Pegawai	
783	Bidang Kedudukan Pegawai	
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	
785	Bidang Cuti	
786	Bidang Penilaian	
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	
788	Bidang Pemberhentian Pegawai	
789	Bidang Pendidikan Pegawai	
790	BIDANG KEUANGAN	
791	Bidang Anggaran	
792	Bidang Otorisasi	
793	Bidang Verifikasi	
794	Bidang Pembukuan	
795	Bidang Pembendaharaan	
796	Bidang Pembina Kebendaharaan	
797	Bidang Pendapatan	
798	-	
799	Bidang Bendaharaan	
800	KEPEGAWAIAN Kebijaksanaan Kepegawaian	
	.1	Perencanaan
	.2	Penelitian
	.04 3	Pengaduan
	.05	Team
	.06	Statistik
	.07	Peraturan perundang- undangan
810	PENGADAAN Meliputi : Lamaran Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai	
811	Lamaran	
	.1	Testing
	.2	Screening
	.3	Panggilan

812	Pengujian kesehatan	
813	Pengangkatan calon pegawai	
	.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
	.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
	.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
	.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
	.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan tenaga lepas	
	.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/ Tenaga Kontrak
	.2	Pengangkatan Tenaga Harian
	.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	Pengangkatan tenaga asing	
816	-	
817	-	
818	-	
819	-	
820	MUTASI Meliputi : Pengangkatan Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Pangkat Pemindahan Pelimpahan Datasering Tugas Belajar Dan Wajib Militer	
821	Pengangkatan	
	.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (tetap)
	1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
	2	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan II
	3	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III
	4	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
	5	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
	6	Pengangkatan dalam jabatan pembebasan dari jabatan.
	.2	Berita Acara serah terima jabatan
822	Kenaikan Gaji Berkala	
	.1	Pegawai Golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
823	Kenaikan pangkat/pengangkatan	
	.1	Pegawai golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
824	Pemindahan/pelimpahan/perbantuan	
	.1	Pegawai golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
	.5	Lolos butuh
	.6	Kurikulum dan Silabi
	.7	Proposal (TOR)

825	Detasering dan penempatan kembali	
826	Penunjukan tugas belajar	
	.1	Dalam Negeri Luar Negeri
	.2	Tunjangan belajar
	.3	Penempatan kembali
827	Wajib militer	
828	Mutasi dengan instansi lain	
829	-	
830	KEDUDUKAN Meliputi : Perhitungan Masa Kerja Penyesuaian Pangkat/ Gaji Penghargaan Ijasah dan Jenjang Pangkat	
831	Perhitungan masa kerja	
832	Penyesuaian pangkat/gaji	
	.1	Pegawai Golongan I
	.2	Pegawai Golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
833	Penghargaan ijasah/ Penyesuaian	
834	Jenjang pangkat/ Eselonering	
835	-	
836	-	
837	-	
838	-	
839	-	
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi : Tunjangan Dana Perawatan Kesehatan Koperasi Distribusi Perumahan/ Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi.	
841	Tunjangan	
	.1	Jabatan
	.2	Kehormatan
	.3	Kematian/Uang Duka
	.4	Tunjangan hari raya
	.5	Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah
	.6	Keluarga
	.7	Sandang PanganPapan(Bapertarum)
842	Dana meliputi :	
	.1	Taspen
	.2	Kesehatan
	.3	Asuransi
843	Perawatan kesehatan	
	.1	Perawatan Poliklinik
	.2	Perawatan Dokter
	.3	Obat-obatan
	.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi/distribusi	
	.1	Distribusi Pangan
	.2	Distribusi Sandang

	.3	Distribusi Papan
845	Perumahan/tanah meliputi :	
	.1	Perumahan pegawai
	.2	Tanah Kapling
	.3	Losmen/Hotel
846	Bantuan sosial meliputi	
	.1	Bantuan Kebakaran
	.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi	
848	Dispensasi	
849	-	
850	CUTI Meliputi cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti hamil cuti naik haji cuti diluar tanggungan Negara dan cuti alasan lain	
851	Cuti tahunan	
852	Cuti besar	
853	Cuti sakit	
854	Cuti hamil	
855	Cuti naik haji/ Umroh	
856	Cuti diluar tanggungan Negara	
857	Cuti alasan lain/ Alasan Penting	
858	-	
859	-	
860	PENILAIAN Meliputi : Penghargaan Hukuman Konduite Ujian Dinas Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi	
861	Penghargaan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan penghargaan meliputi :	
	.1	Bintang/satyalencana
	.2	Kenaikan pangkat anumerta
	.3	Kenaikan gaji istimewa
	.4	Hadiah berupa uang
	.5	Pegawai teladan.
862	Hukuman Arsip atau naskah yang berhubungan dengan hukuman meliputi:	
	.1	Teguran/Peringatan
	.2	Penundaan Kenaikan Gaji
	.3	Penurunan Pangkat
	.4	Pemindahan Catatan : Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat Lihat 887 dan 888
863	Konduite DP3 Disiplin Pegawai	
864	Ujian Dinas	
	.1	Tingkat I
	.2	Tingkat II
	.3	Tingkat III

865	Penilaian kehidupan pegawai negeri Meliputi petunjuk pelaksanaan hidup sederhana penilaian kekayaan pribadi (LP2P)	
866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali	
867	-	
868	-	
869	-	
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi formasi bezzeting registrasi daftar riwayat hak penggajian sumpah/janji dan Korps pegawai	
871	Formasi	
872	Bezzeting/ Daftar Urut Kepegawaian	
873	Registrasi meliputi :	
	.1	NIP
	.2	KARPEG
	.3	Legitimasi/Tanda Pengenal
	.4	Daftar keluarga Perkawinan Perceraian Karis Karsu
874	Daftar riwayat pekerjaan	
	.1	Tanggal lahir
	.2	Penggantian nama
	.3	Izin Kepartaian organisasi
875	Kewenangan mutasi kepegawaian	
	.1	Pelimpahan Wewenang
	.2	Specimen Tanda Tangan
876	Penggajian	
	.1	SKPP
877	Sumpah/Janji pegawai	
878	Korps pegawai	
879	-	
880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi atas pemberhentian permintaan sendiri dengan hak pensiun karena meninggal dunia alasan lain dengan diberi uang pesangon uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat	
881	Permintaan sendiri	
882	Dengan hak pensiun	
	.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
	.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
	.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III
	.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
	.5	Pensiun Janda/Duda
	.6	Pensiun Yatim Piatu
	.7	Uang Muka Pension
883	Karena meninggal	



	.1	Karena Meninggal Dalam Tugas
884		Alasan lain
885		Uang pesangon
886		Uang tunggu
887		Untuk sementara waktu
888		Tidak dengan hormat
889		-
890		PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi : Perencanaan Pendidikan Regular Pendidikan Non Regular Pendidikan Ke Luar Negeri Metode Tenaga Pengajar Administrasi Pendidikan Fasilitas dan Sarana Pendidikan.
891		Perencanaan meliputi :
	.1	Program
	.2	Kurikulum dan Silabi
	.3	Proposal (TOR)
892		Pendidikan reguler/ Kader meliputi :
	.1	IPDN/APDN
	.2	Kursus-Kursus Reguler
893		Pendidikan dan Pelatihan/non reguler meliputi : LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan Struktural SPATI SPAMEN SPAMA ADUMLA ADUM Kursus-kursus / Penataran Diklat Teknik Fungsional dan Managemen Pemerintahan Diklat Lainnya
894		Pendidikan luar negeri meliputi : Berkesinambungan/ Berkala / Bergelar Non Gelar/ Diploma
895		Metode meliputi : Kuliah Ceramah Simposium Diskusi Raker Seminar Lokakarya Orientasi Studi Lapangan KKN Widyawisata Tanya Jawab/ Silabi/ Modul/ Kursil Penugasan Gladi
896		Tenaga pengajar/ Widyaiswara/ Narasumber
	.1	Moderator
897		Administrasi pendidikan meliputi :
	.1	Tahun Pelajaran
	.2	Persyaratan Pendaftaran Testing Ujian
	.3	STTP
	.4	Penilaian Angka Kredit
	.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan
898		Fasilitas Belajar meliputi : Tunjangan Belajar Asrama Uang Makan Uang Transport Uang Buku Uang Ujian Uang Semester/ Uang Kuliah Uang Saku
899		Sarana meliputi : Bantuan Sarana Belajar Bantuan Alat-alat Tulis Bantuan Sarana Belajar Lainnya.
900		KEUANGAN
901		Nota keuangan
902		APBN
903		APBD
904		APBN-P

905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah)
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Rutin)
912	Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Pembangunan)
913	Perubahan anggaran (Anggaran Belanja Tambahan)
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
	.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP)
	.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
	.2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
919	-
920	OTORISASI/ SKO
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM rutin
932	SPM Pembangunan
933	Penerimaan
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan perhitungan anggaran
942	Permintaan data anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	
945	
946	
947	

948	
949	
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek
955	Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
956	Specimen Tanda Tangan
957	Surat Tagihan Piutang Ikhtisar Bulanan
958	-
959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/ BNPT
978	Bantuan Presiden, Menteri dan Bantuan Lainnya
979	-
980	-
981	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

Keterangan :

1. Kode klasifikasi surat dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 900 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif yang menampung masalah-masalah di luar masalah substantif. Di samping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
2. Pokok masalah sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut:
 - 000 umum.
 - 100 pemerintahan.
 - 200 politik.
 - 300 keamanan dan ketertiban.
 - 400 kesejahteraan.
 - 500 perekonomian.
 - 600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan.
 - 700 pengawasan.
 - 800 kepegawaian.
 - 900 keuangan.
3. Kode wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 53.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

KODE PD/UPTD/CABANG DINAS

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
1.	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA		PEMKES
1	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH		PEMKES1
.1	Sub Bagian TU		PEMKES1.1
.2	Sub Bagian Pemerintahan Umum		PEMKES1.2
.3	Sub Bagian Otonomi Daerah		PEMKES1.3
2	BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK		PEMKES2
.1	Sub Bagian Pejabat Daerah dan Pejabat Politik		PEMKES2.1
.2	Sub Bagian Pengembangan Daerah		PEMKES2.2
.3	Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan		PEMKES2.3
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
.1	Sub Bagian Bina Agama		PEMKES3.1
.2	Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga		PEMKES3.2
.3	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan		PEMKES3.3
2.	BIRO HUKUM		HK
1	BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN		HK1
.1	Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah		HK1.1
.2	Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur		HK1.2
.3	Sub Bagian Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum		HK1.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
2	BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA		HK2
	.1	Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah I	HK2.1
	.2	Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah II	HK2.2
	.3	Sub Bagian Tata Usaha Biro	HK2.3
3	BAGIAN BANTUAN HUKUM		HK3
	.1	Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum	HK3.1
	.2	Sub Bagian Hak Azasi Manusia	HK3.2
	.3	Sub Bagian Penyuluhan	HK3.3
3	BIRO EKONOMI DAN KERJASAMA		EK
1	BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI		EK
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	EK1.1
	.2	Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah	EK1.2
	.3	Sub Bagian Non Pemerintahan	EK1.3
2	BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		EK2
	.1	Sub Bagian Kerjasama Lembaga Pemerintahan	EK2.1
	.2	Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintahan	EK2.2
3	BAGIAN EKONOMI		EK3
	.1	Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah	EK3.1
	.2	Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Energi	EK3.2
	.3	Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian	EK3.3
4.	BIRO PENGADAAN BARANG/ JASA		PBJ
1	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN LAYANAN SECARA ELEKTRONIK		PBJ1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	PBJ1.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Sub Bagian Pengeloaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PBJ1.2
	.3	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ1.3
2	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/ JASA		PBJ2
	.1	Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ2.1
	.2	Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ2.2
	.3	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi	PBJ2.3
3	BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		PBJ3
	.1	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ3.1
	.2	Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi	PBJ3.2
	.3	Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBN	PBJ3.3
5.	BIRO UMUM		BU
1	BAGIAN TATA USAHA		BU1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	BU1.1
	.2	Sub Tata Usaha Pimpinan	BU1.2
	.3	Sub Bagian Administrasi dan Ekspedisi	BU1.3
2	BAGIAN RUMAH TANGGA		BU2
	.1	Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan	BU2.1
	.2	Sub Bagian Perlengkapan	BU2.2
	.3	Sub Bagian Urusan Umum	BU2.3
3	BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN		BU3
	.1	Sub Bagian Verifikasi	BU3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Sub Bagian Belanja Pegawai	BU3.2
	.3	Sub Bagian Belanja Non Pegawai	BU3.3
6.	BIRO ORGANISASI		BO
1	BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN		BO1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	BO1.1
	.2	Sub Bagian Kelembagaan	BO1.2
	.3	Sub Bagian Analisa Jabatan	BO1.3
2	BAGIAN TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK		BO2
	.1	Sub Bagian Tatalaksana	BO2.1
	.2	Sub Bagian Pelayanan Publik	BO2.2
3	BAGIAN KINERJA ORGANISASI		BO3
	.1	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	BO3.1
	.2	Sub Bagian Reformasi Birokrasi	BO3.2
7.	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL		HP
1	BAGIAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN		HP1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	HP1.1
	.2	Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	HP1.2
2	BAGIAN PERS, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM DAN PERPUSTAKAAN		HP2
	.1	Sub Bagian Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum	HP2.1
	.2	Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Penerbitan	HP2.2
	.3	Sub Bagian Perpustakaan Sekretariat Daerah	HP2.3
3	BAGIAN PROTOKOL		HP3
	.1	Sub Bagian Acara	HP3.1
	.2	Sub Bagian Tamu	HP3.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3	Seksi Jaminan Sosial Keluarga	DINSOS5.3
6	UPTD...		UDINSOS1...
15.	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		KTKT
1	SEKRETARIAT		KTKT1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	KTKT1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	KTKT1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KTKT1.3
2	BIDANGKELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KTKT2
	.1	Seksi Kelembagaan	KTKT2.1
	.2	Seksi Pengawasan	KTKT2.2
	.3	Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan	KTKT2.3
3	BIDANGPEMBERDAYAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH		KTKT3
	.1	Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	KTKT3.1
	.2	Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	KTKT3.2
	.3	Seksi Pengembangan, Promosi Koperasi dan Usaha Kecil	KTKT3.3
4	BIDANGKETENAGAKERJAAN		KTKT4
	.1	Seksi Penempatan, Pembinaan Dan Pemagangan Tenaga Kerja	KTKT4.1
	.2	SeksiPengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial	KTKT4.2
	.3	Seksi Informasi Pasar Kerja Dan Perselisihan Hubungan Industrial	KTKT4.3
5	BIDANG KETRANSMIGRASIAN		KTKT5
	.1	Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	KTKT5.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana	DINKES2.1
	.2	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES2.2
	.3	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	DINKES2.3
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		DINKES3
	.1	Seksi Surveilens dan Imunisasi	DINKES3.1
	.2	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	DINKES3.2
	.3	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa	DINKES3.3
4	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		DINKES4
	.1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	DINKES4.1
	.2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINKES4.2
	.3	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	DINKES4.3
5	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINKES5
	.1	Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	DINKES5.1
	.2	Seksi Pengembangan SDM Kesehatan	DINKES5.2
	.3	Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan	DINKES5.3
6	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINKES6
	.1	Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DINKES6.1
	.2	Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil	DINKES6.2
	.3	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	DINKES6.3
7	UPTD.....		UDINKES1...

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT		PUPR
1	SEKRETARIAT		PUPR1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PUPR1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PUPR1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PUPR1.3
2	BIDANG BINA MARGA		PUPR2
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR2.1
	.2	Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik	PUPR2.2
	.3	Seksi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan	PUPR2.3
3	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR3
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR3.1
	.2	Seksi Pembangunan Irigasi	PUPR3.2
	.3	Seksi Pembangunan Sumber Daya Air	PUPR3.3
4	BIDANG OPERASI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR4
	.1	Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi	PUPR4.1
	.2	Seksi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	PUPR4.2
	.3	Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Air	PUPR4.3
5	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		PUPR5
	.1	Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	PUPR5.1
	.2	Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	PUPR5.2
	.3	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	PUPR5.3
6	BIDANG CIPTA KARYA		PUPR6

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	PUPR6.1
	.2	Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	PUPR6.2
	.3	Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakarya	PUPR6.3
7	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		PUPR7
	.1	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	PUPR7.1
	.2	Seksi Penyediaan Perumahan	PUPR7.2
	.3	Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PUPR7.3
8	UPTD		UPUPR1....
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		SATPOLPP
1	SEKRETARIAT		SATPOLPP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	SATPOLPP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	SATPOLPP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	SATPOLPP1.3
2	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOLPP2
	.1	Seksi Operasi Dan Pengendalian	SATPOLPP2.1
	.2	Seksi Hubungan Kelembagaan	SATPOLPP2.2
3	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR		SATPOLPP3
	.1	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	SATPOLPP3.1
	.2	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	SATPOLPP3.2
4	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR		SATPOLPP4
	.1	Seksi Pelatihan Dasar Dan Teknis Fungsional	SATPOLPP4.1
	.2	Seksi Kesamaptaan	SATPOLPP4.2
5	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		SATPOLPP5
	.1	Seksi Bina Potensi, Kewaspadaan Dan	SATPOLPP5.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
		Mobilisasi	
	.2	Seksi PenanggulanganKebakaran	SATPOLPP5.2
14.	DINAS SOSIAL		DINSOS
1	SEKRETARIAT		DINSOS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DINSOS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DINSOS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DINSOS1.3
2	BIDANGPEMBERDAYAAN SOSIAL		DINSOS2
	.1	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dan Sumber Dana Bantuan Sosial	DINSOS2.1
	.2	SeksiKepahlawanan Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan Sosial	DINSOS2.2
	.3	Seksi Penyuluhan	DINSOS2.3
3	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN		DINSOS3
	.1	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	DINSOS3.1
	.2	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	DINSOS3.2
	.3	Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara	DINSOS3.3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL		DINSOS4
	.1	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia	DINSOS4.1
	.2	Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	DINSOS4.2
	.3	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Migran	DINSOS4.3
5	BIDANGPERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS5
	.1	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	DINSOS5.1
	.2	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	DINSOS5.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3	Sub Bagian Perjalanan	HP3.3
8.	SEKRETARIAT DPRD		SETWAN
1	BAGIAN UMUM		SETWAN1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	SETWAN1.1
	.2	Sub Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam	SETWAN1.2
	.3	Sub Bagian Protokol dan Perjalanan	SETWAN1.3
2	BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH		SETWAN2
	.1	Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi	SETWAN2.1
	.2	Sub Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan	SETWAN2.2
	.3	Sub Bagian Humas dan Publikasi	SETWAN2.3
3	BAGIAN KEUANGAN		SETWAN3
	.1	Sub Bagian Anggaran	SETWAN3.1
	.2	Sub Bagian Administrasi Keuangan	SETWAN3.2
	.3	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	SETWAN3.3
9.	INSPEKTORAT		INSP
1	SEKRETARIAT		INSP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	INSP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	INSP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	INSP1.3
2	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		INSPI
3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		INSPII
4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		INSPIII
5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV		INSPIV
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		PK
1	SEKRETARIAT		PK1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi	KTKT5.2
	.3	Seksi Penempatan, Pemindahan dan Sarana Prasarana	KTKT5.3
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		DP3A
1	SEKRETARIAT		DP3A1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DP3A1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DP3A1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DP3A1.3
2	BIDANG KELEMBAGAAN GENDER DAN KEMITRAAN		DP3A2
	.1	Seksi Pengarusutamaan gender	DP3A2.1
	.2	SeksiKemitraan	DP3A2.2
3	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA		DP3A3
	.1	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	DP3A3.1
	.2	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	DP3A3.2
4	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		DP3A4
	.1	Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	DP3A4.1
	.2	Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan, Anak Dan Perdagangan Orang	DP3A4.2
5	BIDANGPEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3A5
	.1	Seksi Pemenuhan Hak Anak	DP3A5.1
	.2	Seksi Perlindungan Khusus Anak	DP3A5.2
17.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		DPKP
1	SEKRETARIAT		DPKP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPKP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPKP1.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPKP1.3
2	BIDANGTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		DPKP2
	.1	Seksi Produksi Serealia	DPKP2.1
	.2	SeksiProduksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian	DPKP2.2
	.3	SeksiProduksi Hortikultura	DPKP2.3
3	BIDANG PERKEBUNAN		DPKP3
	.1	Seksi Produksi Tanaman Tahunan	DPKP3.1
	.2	Seksi Produksi Tanaman Semusim	DPKP3.2
	.3	Seksi Produksi tanaman Rempah dan Penyegar	DPKP3.3
4	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN		DPKP4
	.1	SeksiKetersediaan dan Distribusi Pangan	DPKP4.1
	.2	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	DPKP4.2
	.3	Seksi Penyuluhan	DPKP4.3
5	BIDANGPRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN		DPKP5
	.1	Seksi Pengelolaan Lahan dan Air	DPKP5.1
	.2	Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian	DPKP5.2
	.3	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	DPKP5.3
6	UPTD...		UDPKP1
18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		DLHK
1	SEKRETARIAT		DLHK1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DLHK1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DLHK1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DLHK1.3
2	BIDANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN		DLHK2
	.1	Seksi Tata Lingkungan Dan Kehutanan	DLHK2.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan	DLHK2.2
	.3	Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan	DLHK2.3
3	BIDANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN		DLHK3
	.1	Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum	DLHK3.1
	.2	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	DLHK3.2
	.3	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	DLHK3.3
4	BIDANG PEMBINAAN		DLHK4
	.1	Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	DLHK4.1
	.2	Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	DLHK4.2
	.3	Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	DLHK4.3
5	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL		DLHK5
	.1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	DLHK5.1
	.2	Seksi Penyuluhan	DLHK5.2
	.3	Seksi Bina Usaha Kehutanan	DLHK5.3
6	UPTD...		UDLHK1..
7	CABANG DINAS...		CLHK1..
19.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		DPMD
1	SEKRETARIAT		DPMD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPMD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPMD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPMD1.3
2	BIDANGKELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT		DPMD2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	DPMD2.1
	.2	SeksiPemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya	DPMD2.2
3	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		DPMD3
	.1	Seksi Bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat	DPMD3.1
	.2	SeksiBina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DPMD3.2
4	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA		DPMD4
	.1	SeksiPengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	DPMD4.1
	.2	SeksiBina Sarana Prasarana Desa	DPMD4.2
5	BIDANGBINA PEMERINTAHAN DESA		DPMD5
	.1	Seksi Fasilitas Penataan Dan Administrasi Desa	DPMD5.1
	.2	Seksi Pengembangan kapasitas aparatur desa dan evaluasi perkembangan desa	DPMD5.2
20.	DINAS PERHUBUNGAN		DISHUB
1	SEKRETARIAT		DISHUB1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DISHUB1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DISHUB1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DISHUB1.3
2	BIDANG LALU LINTAS JALAN		DISHUB2
	.1	Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan	DISHUB2.1
	.2	SeksiRekayasa Lalu Lintas Jalan	DISHUB2.2
	.3	Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DISHUB2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
3	BIDANG ANGKUTAN JALAN		DISHUB3
	.1	Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal	DISHUB3.1
	.2	Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	DISHUB3.2
	.3	Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan	DISHUB3.3
4	BIDANG KEPELABUHANAN		DISHUB4
	.1	Seksi Pembangunan Pelabuhan	DISHUB4.1
	.2	Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan	DISHUB4.2
	.3	Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan	DISHUB4.3
5	BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN		DISHUB5
	.1	Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat	DISHUB5.1
	.2	Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran	DISHUB5.2
	.3	Seksi Angkutan Penyeberangan	DISHUB5.3
6	UPTD...		UDISHUB1...
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI		KOMINFO
1	SEKRETARIAT		KOMINFO1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	KOMINFO1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	KOMINFO1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KOMINFO1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO2
	.1	Seksi pengelolaan Media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik	KOMINFO2.1
	.2	Seksi Pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik	KOMINFO2.2
	.3	Seksi Pengelolaan data dan statistik sektoral	KOMINFO2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
3	BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI		KOMINFO3
	.1	Seksi Tata kelola persandian	KOMINFO3.1
	.2	Seksi Operasional pengamanan Sandi	KOMINFO3.2
	.3	Seksi Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi	KOMINFO3.3
4	BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		KOMINFO4
	.1	Seksi Tata kelola dan pengembangan infrastruktur	KOMINFO4.1
	.2	Seksi Pengawasan dan pengendalian infrastruktur	KOMINFO4.2
	.3	Seksi Pelayanan infrastruktur	KOMINFO4.3
5	BIDANG LAYANANE-GOVERNMENT		KOMINFO5
	.1	Seksi Pengembangan Aplikasi	KOMINFO5.1
	.2	Seksi Pengembangan Ekosistem E-government	KOMINFO5.2
	.3	Seksi Tata kelola E-government	KOMINFO5.3
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DPMPTSP
1	SEKRETARIAT		DPMPTSP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPMPTSP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPMPTSP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPMPTSP1.3
2	BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DPMPTSP2
	.1	Seksi Data dan informasi	DPMPTSP2.1
	.2	Seksi Pengembangan Potensi	DPMPTSP2.2
3	BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP3
	.1	Seksi Pengembangan promosi penanaman modal	DPMPTSP3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pelaksanaan promosi penanaman modal	DPMPTSP3.2
4	BIDANG PELAYANAN TERPADU		DPMPTSP4
	.1	Seksi Analisis perijinan dan non perijinan	DPMPTSP4.1
	.2	SeksiPengkajian perijinan dan non perijinan	DPMPTSP4.2
	.3	SeksiPelayanan perijiinan dan non perijinan	DPMPTSP4.3
5	BIDANGPENGENDALIAN		DPMPTSP5
	.1	Seksi Pemantauan dan pengawasan	DPMPTSP5.1
	.2	Seksi Pelayanan Pengaduan	DPMPTSP5.2
6	UPTD...		UDPMPTSP1..
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		PO
1	SEKRETARIAT		PO1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PO1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PO1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PO1.3
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA		PO2
	.1	Seksi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, Iptek dan Imtaq Pemuda	PO2.1
	.2	SeksiPeningkatan wawasan dan kapasitas pemuda	PO2.2
	.3	Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda	PO2.3
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA		PO3
	.1	Seksi Kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda	PO3.1
	.2	Seksi Organisasi kepemudaan dan kepanduan	PO3.2
	.3	Seksi Infrastruktur dan kewirausahaan pemuda	PO3.3
4	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		PO4
	.1	SeksiOlahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	PO4.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	PO4.2
	.3	Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	PO4.3
5	BIDANGPENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		PO5
	.1	Seksi Pembibitan, iptek Dan Tenaga Keolahragaan	PO5.1
	.2	Seksi Promosi olahraga Dan Olahraga Prestasi	PO5.2
	.3	Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	PO5.3
6	UPTD...		UPO1...
24.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		ARPUS
1	SEKRETARIAT		ARPUS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	ARPUS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	ARPUS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	ARPUS1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP		ARPUS2
	.1	SeksiPengelolaan Arsip Dinamis	ARPUS2.1
	.2	Seksi Pengelolaan Arsip Statis	ARPUS2.2
	.3	Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	ARPUS2.3
3	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN		ARPUS3
	.1	Seksi Pembinaan Kearsipan	ARPUS3.1
	.2	Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan	ARPUS3.2
	.3	SeksiPengawasan Kearsipan	ARPUS3.3
4	BIDANGPENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA		ARPUS4
	.1	Seksi Deposit	ARPUS4.1
	.2	SeksiAkuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka	ARPUS4.2
	.3	SeksiPreservasi dan Alih Media Bahan Pustaka	ARPUS4.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
5	BIDANGLAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		ARPUS5
	.1	Seksi Layanan Perpustakaan	ARPUS5.1
	.2	Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	ARPUS5.2
	.3	Seksi Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan	ARPUS5.3
25.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP
1	SEKRETARIAT		DKP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DKP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DKP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DKP1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA		DKP2
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		DKP3
4	BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP4
5	BIDANGPENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP5
6	UPTD...		UDKP1...
7	CABANG DINAS...		CDKP1...
26.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF
1	SEKRETARIAT		PAREKRAF1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PAREKRAF1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PAREKRAF1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PAREKRAF1.3
2	BIDANG DESTINASI PARIWISATA		PAREKRAF2
	.1	Seksi Sarana Prasarana	PAREKRAF2.1
	.2	Seksi pengembanganAtraksi Wisata Alam	PAREKRAF2.2
	.3	Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan	PAREKRAF2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
		Buatan	
3	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF3
	.1	Seksi Industri Pariwisata	PAREKRAF3.1
	.2	Seksi Usaha EkonomiKreatif	PAREKRAF3.2
	.3	Seksi Jaringan Pemasaran	PAREKRAF3.3
4	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA		PAREKRAF4
	.1	SeksiPromosi Pariwisata	PAREKRAF4.1
	.2	Seksi Analisa Pasar Pariwisata	PAREKRAF4.2
	.3	Seksi Informasi Pemasaran Pariwisata	PAREKRAF4.3
5	BIDANGKELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF5
	.1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	PAREKRAF5.1
	.2	Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata	PAREKRAF5.2
	.3	Seksi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PAREKRAF5.3
6	UPTD...		UPAREKRAF1..
27.	DINAS PETERNAKAN		DISNAK
1	SEKRETARIAT		DISNAK1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DISNAK1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DISNAK1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DISNAK1.3
2	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN		DISNAK2
	.1	Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan	DISNAK2.1
	.2	SeksiPenerapan Teknologi Peternakan	DISNAK2.2
	.3	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan	DISNAK2.3
3	BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK		DISNAK3
	.1	Seksi Ternak Ruminansia	DISNAK3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Ternak Non Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak	DISNAK3.2
	.3	Seksi Pakan Ternak	DISNAK3.3
4	BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DISNAK4
	.1	Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan	DISNAK4.1
	.2	Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	DISNAK4.2
	.3	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISNAK4.3
5	BIDANG AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN		DISNAK5
	.1	Seksi Investasi dan Kelembagaan Usaha Peternakan	DISNAK5.1
	.2	Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Kemitraan	DISNAK5.2
	.3	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	DISNAK5.3
6	UPTD...		UDISNAK1...
28.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PERINDAG
1	SEKRETARIAT		PERINDAG1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PERINDAG1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PERINDAG1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PERINDAG1.3
2	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI		PERINDAG2
	.1	Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	PERINDAG2.1
	.2	Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi	PERINDAG2.2
	.3	Seksi Pengawasan dan pengendalian	PERINDAG2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
3	BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI		PERINDAG3
	.1	Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	PERINDAG3.1
	.2	Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri	PERINDAG3.2
	.3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri	PERINDAG3.3
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN		PERINDAG4
	.1	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	PERINDAG4.1
	.2	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	PERINDAG4.2
	.3	Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3dn)	PERINDAG4.3
5	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		PERINDAG5
	.1	Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	PERINDAG5.1
	.2	Seksi Tertib Niaga	PERINDAG5.2
	.3	Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	PERINDAG5.3
6	UPTD...		UPERINDAG1..
29.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		ESDM
1	SEKRETARIAT		ESDM1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	ESDM1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	ESDM1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	ESDM1.3
2	BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH		ESDM2
3	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA		ESDM3
4	BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM4
5	BIDANG KETENAGALISTRIKAN		ESDM5

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
6	UPTD...		UESDM1...
7	CABANG DINAS...		CESDM1...
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		BP4D
1	SEKRETARIAT		BP4D1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BP4D1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BP4D1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BP4D1.3
2	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA		BP4D2
	.1	Sub BidangKesejahteraan Sosial dan Budaya	BP4D2.1
	.2	Sub BidangPemerintahan dan Politik	BP4D2.2
	.3	Sub BidangPengembangan Sumber Daya Manusia	BP4D2.3
3	BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BP4D3
	.1	Sub BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah	BP4D3.1
	.2	Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam	BP4D3.2
	.3	Sub BidangPariwisata, Keuangan dan Jasa	BP4D3.3
4	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI		BP4D4
	.1	Sub BidangPerencanaan, Pendanaan, Data dan Informasi	BP4D4.1
	.2	Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Pusat	BP4D4.2
	.3	Sub BidangPengendalian dan Evaluasi Kabupaten/Kota dan Lembaga Internasional	BP4D4.3
5	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BP4D5
	.1	Sub BidangPenelitian dan Pengembangan Utama	BP4D5.1
	.2	Sub BidangPenelitian dan Pengembangan	BP4D5.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
		Pendukung	
	.3	Sub Bidang Inovasi	
31	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		BPAD
1	SEKRETARIAT		BPAD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPAD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPAD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPAD1.3
2	BIDANG PENDAPATAN I		BPAD2
	.1	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	BPAD2.1
	.2	Sub Bidang Layanan dan Keberatan	BPAD2.2
	.3	Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan	BPAD2.3
3	BIDANG PENDAPATAN II		BPAD3
	.1	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan I	BPAD3.1
	.2	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan II	BPAD3.2
	.3	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan III	BPAD3.3
4	BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET		BPAD4
	.1	Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan	BPAD4.1
	.2	Sub Bidang Penatausahaan Aset	BPAD4.2
	.3	Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset	BPAD4.3
5	BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGAMANAN ASET		BPAD5
	.1	Sub Bidang Pemanfaatan Aset	BPAD5.1
	.2	Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	BPAD5.2
	.3	Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian	BPAD5.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
		Sengketa Aset	
6	UPTD...		UBPAD1....
32	BADAN KEUANGAN DAERAH		BKUD
1	SEKRETARIAT		BKUD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BKUD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BKUD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BKUD1.3
2	BIDANG ANGGARAN		BKUD2
	.1	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	BKUD2.1
	.2	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	BKUD2.2
	.3	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum	BKUD2.3
3	BIDANGPERBENDAHARAAN		BKUD3
	.1	Sub BidangPembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	BKUD3.1
	.2	Sub BidangPembayaran bidang perekonomian dan pembangunan	BKUD3.2
	.3	Sub BidangPengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara	BKUD3.3
4	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN		BKUD4
	.1	Sub BidangAkuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan	BKUD4.1
	.2	Sub BidangAkuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan	BKUD4.2
	.3	Sub BidangAkuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	BKUD4.3
5	BIDANGPEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA		BKUD5

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah I	BKUD5.1
	.2	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah II	BKUD5.2
	.3	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah III	BKUD5.3
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		BKD
1	SEKRETARIAT		BKD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BKD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BKD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BKD1.3
2	BIDANG PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI		BKD2
	.1	Sub BidangPerencanaan danFormasi Pegawai	BKD2.1
	.2	Sub BidangSistem Informasi Pegawai	BKD2.2
	.3	Sub BidangPendidikan Aparatur	BKD2.3
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI		BKD3
	.1	Sub BidangJabatan Fungsional Tertentu	BKD3.1
	.2	Sub Bidang Jabatan Struktural	BKD3.2
	.3	Sub BidangPenilaian Kompetensi dan Kinerja	BKD3.3
4	BIDANG MUTASI PEGAWAI DAN Pensiun PEGAWAI		BKD4
	.1	Sub BidangKenaikan Pangkat	BKD4.1
	.2	Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai	BKD4.2
5	BIDANGDISIPLIN DANKORPRI		BKD5
	.1	Sub BidangDisiplin pegawai	BKD5.1
	.2	Sub BidangKesejahteraan pegawai	BKD5.2
	.3	Sub BidangKorpri	BKD5.3
6	UPTD		UBKD.1.
34.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		BPSDMD

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	MANUSIA DAERAH		
1	SEKRETARIAT		BPSDMD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPSDMD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPSDMD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPSDMD1.3
2	BIDANG KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL		BPSDMD2
	.1	Sub Bidang Pelatihan Dasar	BPSDMD2.1
	.2	Sub Bidang Pelatihan Kepemimpinan	BPSDMD2.2
	.3	Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Kultural	BPSDMD2.3
3	BIDANG KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL		BPSDMD3
	.1	Sub Bidang Teknis	BPSDMD3.1
	.2	Sub Bidang Fungsional	BPSDMD3.2
	.3	Sub Bidang Kurikulum dan Perangkat	BPSDMD3.3
4	BIDANG SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN		BPSDMD4
	.1	Sub Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	BPSDMD4.1
	.2	Sub Bidang Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi	BPSDMD4.2
	.3	Sub Bidang Sarana dan Prasarana	BPSDMD4.3
5	UPTD...		UBPSDMD1...
35.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BPBD
1	SEKRETARIAT		BPBD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPBD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPBD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPBD1.3
2	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BPBD2
	.1	Seksi Pencegahan	BPBD2.1
	.2	Seksi Kesiapsiagaan	BPBD2.2
3	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BPBD3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Kedaruratan	BPBD3.1
	.2	Seksi Logistik	BPBD3.2
4	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		BPBD4
	.1	Seksi Rehabilitasi	BPBD4.1
	.2	Seksi Rekonstruksi	BPBD4.2
5	UPTD...		UBPBD1...
36.	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		BPD
1	SUB BAGIAN TATA USAHA		BPD1
2	SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		BPD2
3	SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		BPD3
4	SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN		BPD4
37.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN		BATAS
1	SEKRETARIAT		BATAS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BATAS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BATAS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BATAS1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA		BATAS2
	.1	Sub Bidang Pengelolaan Perbatasan Antar Negara	BATAS2.1
	.2	Sub Bidang Batas dan Yuridiksi Wilayah Antar Negara	BATAS2.2
3	BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN		BATAS3
	.1	Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat Dan laut	BATAS3.1
	.2	Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan	BATAS3.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
4	BIDANG PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA		BATAS4
	.1	Sub Bidang Infrastruktur Fisik	BATAS4.1
	.2	Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra	BATAS4.2
5	BIDANG PENEGASAN BATAS DAERAH		BATAS5
	.1	Sub Bidang Penegasan batas daerah kabupaten / Kota	BATAS5.1
	.2	Sub Bidang Fasilitas perselisihan batas daerah kabupaten / kota	BATAS5.2
38.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		KESBANG
1	SEKRETARIAT		KESBANG1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	KESBANG1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	KESBANG1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KESBANG1.3
2	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN		KESBANG2
	.1	Sub Bidang Bina Ideologi	KESBANG2.1
	.2	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	KESBANG2.2
3	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL		KESBANG3
	.1	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Dan Lembaga Asing	KESBANG3.1
	.2	Sub Bidang Penanganan Konflik	KESBANG3.2
4	BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI		KESBANG4
	.1	Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	KESBANG4.1
	.2	Sub Bidang Ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi	KESBANG4.2
5	BIDANG POLITIK		KESBANG5

h

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik	KESBANG5.1
	.2	Sub BidangKelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu	KESBANG5.2
39.	RSUD W.Z. JOHANNES KUPANG		RSUD
1	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS		
	.1	BIDANG PELAYANAN MEDIS	RSUD1.1
		1 Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Medis	RSUD1.11
		2 Sub Bidang Mutu dan Etika Pelayanan Medis	RSUD1.12
	.2	BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	RSUD1.2
		1 Sub bidang Sumber daya pelayanan keperawatan	RSUD1.21
		2 Sub bidang Mutu dan etika pelayanan keperawatan	RSUD1.22
	2 WAKIL DIREKTUR PENUNJANG PELAYANAN		
	.1	BIDANG PENUNJANG PELAYANAN	RSUD2.1
		1 Sub bidang Sumber dayapenunjang pelayanan	RSUD2.11
		2 Sub bidang Mutu dan etika penunjang pelayanan	RSUD2.12
3	.2	BIDANG PENGEMBANGAN	RSUD2.2
		1 Sub bidang Pendidikan, pelatihan dan penelitian	RSUD2.21
		2 Sub bidang Marketing dan customer care	RSUD2.22
	3 WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM		
	.1	BAGIAN SEKRETARIAT	RSUD3.1
		1 Sub Bagian Umum	RSUD3.11
		2 Sub Bagian Kepegawaian	RSUD3.12
		3 Sub Bagian Hukum Dan Hubungan	RSUD3.13

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
		Masyarakat	
	.2	BAGIAN PERENCANAAN	RSUD3.2
	1	Sub bagian perencanaan dan penganggaran	RSUD3.21
	2	Sub bagian Monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan	RSUD3.22
	.3	BAGIAN KEUANGAN	RSUD3.3
	1	Sub bagianPerbendaharaan	RSUD3.31
	2	Sub bagian akuntansiSub bagian verifikasi	RSUD3.32

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

h

dy

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

TEKNIK PENCANTUMAN NOMOR

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi surat edaran, surat dinas/ surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat pengantar, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat kuasa, surat undangan, surat keterangan melaksanakan tugas, surat keterangan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, pegumuman, laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, notulen, piagam, sertifikat, STTP dan piagam.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas.

Contoh:

Surat dinas/surat biasa dari Biro Organisasi mengenai pelayanan publik yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan pelayanan publik)	067	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Urut	78	Diisi oleh petugas TU pada biro Organisasi
Nomor Kode PD	BO21	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Naskah Dinas surat dinas/surat biasa adalah sebagai berikut: 067/ 78/ BO2.1		

Instruksi Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ NomorUrut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas

Contoh:

Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan penyakit menular)	443	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinkes
Nomor Urut	02	Diisi oleh petugas TU pada Dinkes
Nomor Kode PD	Dinkes3.2	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Dinkes
Nomor Instruksi Gubernur adalah sebagai berikut: 443/02/dinkes3.2		

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor urut/ Nomor Kode Perjanjian/ Tahun Pembuatan.

Contoh : Perjanjian Bidang Tata Lingkungan Persampahan.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi	660	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama
Nomor Urut	09	
Nomor Kode Perjanjian	PERJ-1	
Tahun Pembuatan	2019	
Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut: 660/09/Perj-I/ 2019		

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas/ Tahun pembuatan.


JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi	660	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama
Nomor Urut	09	
Nomor Kode PD	Eks12	
Tahun Pembuatan	2019	
Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut: 660/09/Eks12/ 2019		

Standarisasi penomoran Naskah DinasUPT :

Contoh penulisan :

425/10/UpPK11

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

NOMOR KODE PERJANJIAN

KODE PERJANJIAN	KETERANGAN
PERJ- I	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
PERJ-II	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
PERJ-III	PERJANJIAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 
VIKTOR BINGTILU LAISKODAT